

PERANAN DALANG WAYANG KULIT DALAM PROPAGANDA PEMBANGUNAN DI BAWAH ORDE BARU

Fadhil Nugroho Adi

Suara Merdeka
Jalan Pandanaran No. 30 Semarang
e-mail: fadhilnugrohoadi@gmail.com

Naskah masuk: 07-08-2017

Revisi akhir: 27-10-2017

Disetujui terbit: 06-11-2017

THE ROLE OF DALANG (PUPPETEERS) IN PROPAGANDIZING NATIONAL DEVELOPMENT DURING THE NEW ORDER

Abstract

This research looks at the process of delivering propaganda by the dalangs (puppeteers) in Wayang Kulit performances in Central Java in 1986-1998. Using mass communication approach and theories, this research has revealed that the dalangs were co-opted by the government when they deliver the New Order Government's messages to their audience. The Government's strong efforts to cast its political propaganda through the dalangs were so obvious after the 30th September Movement. As a result, there were changes in the concepts of wayang kulit performance. The dalangs very often delivered the Government messages both implicitly or explicitly. These messages are delivered through janturan (narration), ginem (dialogue), gending (music), limbukan (interlude scene between a mother and her daughter), and gara-gara (clown scene). However, this condition had encouraged the dalangs' creativity to compose new stories, modify stories, and compose songs which tell about national development.

Keywords: *dalang, New Order, propaganda, national development*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji proses penyampaian propaganda yang disampaikan melalui dalang di Indonesia khususnya Jawa Tengah pada tahun 1986-1998. Pendekatan yang dipergunakan adalah teori komunikasi massa pada pertunjukan wayang kulit. Melalui penelitian terungkap adanya kooptasi terhadap dalang dalam melakukan penyampaian pesan-pesan pemerintah Orde Baru kepada masyarakat luas. Usaha pemerintah untuk melakukan propaganda melalui dalang begitu kentara pasca Gerakan 30 September. Akibatnya, terjadi perubahan konsep pertunjukan wayang kulit. Seringkali dalang menyisipkan pesan-pesan pemerintah, baik secara implisit maupun terang-terangan. Pesan-pesan ini disampaikan melalui janturan, ginem, gending, termasuk dalam adegan limbukan dan gara-gara. Namun pentas wayang kulit pada era Orde Baru juga mendorong kreativitas para dalang dalam menciptakan lakon baru, mengubah lakon, hingga menciptakan gending-gending bernuansa pembangunan.

Kata kunci: *dalang, Orde Baru, propaganda*

I. PENDAHULUAN

Pagelaran wayang kulit seolah tak lekang oleh zaman. Meski banyak pihak merasa sangsi akan eksistensi wayang kulit, namun nyatanya, pagelaran seni tradisional itu masih bertahan hingga hari ini. Bukan sekadar pentas biasa, pagelaran wayang kulit seringkali membawa misi untuk disampaikan kepada masyarakat. Misi yang diemban bermacam-macam. Namun yang paling umum, pagelaran wayang kulit sering

dipergunakan lembaga pemerintah untuk mensosialisasikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara melalui lakon yang dipentaskan. Oleh sebab itu, dalang menjadi figur sentral yang berjasa besar mengkomunikasikan amanat pemerintah kepada rakyat. Pesan-pesan tersebut dapat berupa pesan bernuansa sosial, politik, dan budaya. Selain itu, dalang juga berperan sebagai media pendidikan informal yang mengajarkan nilai-nilai filosofis dari lakon dan tokoh-tokoh wayang.

Dalam tradisi pewayangan di Jawa Tengah, dalang memiliki predikat tertentu bergantung pada kelebihan yang dimiliki, seperti *dalang sejati*, *dalang purba*, *dalang wasesa*, *dalang guna*, dan *dalang wikalpa*. Dalang juga memiliki fungsi strategis dalam pergelaran. Ia bisa berfungsi sebagai seniman, juru didik, juru falsafah dan kerohanian, juru suluh, juru dakwah, juru hiburan, komunikator sosial, dan pelestari seni budaya.¹ Dengan demikian, dalang tidak bisa dikatakan sebatas sebagai *story teller* melainkan tukang *ngudal piwulang* (pemberi nasehat). Dalang merupakan penceramah pendidikan, penerangan, motivator, hingga pedalangan mampu menginspirasi publik bagi lahirnya kreasi atau usaha baru yang bermanfaat bagi manusia.²

Pada periode kepemimpinan Soekarno maupun Soeharto, wayang kulit telah menjadi media yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dari partai tertentu maupun pemerintah. Bentuk penyampaian semacam ini identik dengan sebuah proses komunikasi yang berlangsung antara kedua belah pihak yakni dalang dan penonton atau pendengar. Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah tukar menukar pikiran atau pendapat. Komunikasi tidak hanya sekadar saling tukar pikiran serta pendapat saja, akan tetapi berlangsung lebih jauh dari itu yakni kegiatan dimana seseorang berusaha mengubah pendapat dan tingkah laku orang lain.³ Dalam proses komunikasi, kedudukan komunikan dan komunikator saling berusaha untuk memperoleh perhatian dari pihak yang diajak berkomunikasi. Proses sering diartikan sebagai kegiatan atau pengolahan yang terus menerus. Apabila komunikasi itu suatu proses, berarti peristiwa dan atau perubahan

yang berhubungan dengan komunikasi berlangsung susul-menyusul terus menerus.⁴

Dalam sebuah proses komunikasi terdapat individu-individu maupun kelompok-kelompok yang berperan sebagai komunikator maupun komunikan. Komunikator atau *sender* atau *encoder* adalah pihak atau seseorang yang bertugas menyampaikan komunikasi dan dapat dilakukan secara perorangan ataupun secara terikat oleh suatu organisasi tertentu.⁵ Sementara itu, komunikan adalah pihak yang menerima isi (*message*) dalam kegiatan komunikasi. Komunikan dapat berupa seorang individu, suatu kelompok atau orang banyak baik dalam satu tempat ataupun tempat yang terpisah-pisah.⁶ Sebagai komunikator, dalang dapat menyampaikan seluruh kemampuan dan pengetahuannya secara leluasa kepada komunikan yang merupakan penonton atau pendengarnya. Dalang juga berfungsi sebagai mediator yang harus menyaring pesan-pesan pembangunan dari pemerintah agar improvisasi yang dilakukan tidak merusak pertunjukan.⁷

Proses komunikasi antara dalang dengan *audience* merupakan perwujudan dari komunikasi massa. Hal ini sejalan dengan pendapat Drs. M.O. Palapah bahwa komunikasi massa adalah pernyataan manusia yang ditujukan kepada massa. Bentuk-bentuk komunikasi massa antara lain jurnalistik, *public relations*, penerangan, propaganda, agitasi, *advertising*, *public speaking*, *publicity*, pertunjukan, komunikasi internasional, dan lain sebagainya.⁸ Sementara itu pesan-pesan "titipan" pemerintah atau kelompok tertentu yang diselipkan ke dalam pentas wayang kulit identik dengan bentuk komunikasi massa propaganda. Propaganda dapat dianggap sebagai suatu kampanye yang dengan sengaja

¹ S. Ilaryanto, *Pratinimba Adhiluhung* (Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 9-18.

² *Ibid.*, hlm. 18.

³ Sunarjo, Djoenacsih S, Sunarjo, *Himpunan Istilah Komunikasi* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 37.

⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁷ Kanti Walujo, *Peranan Dalang dalam Menyampaikan Pesan Pembangunan* (Jakarta: Direktorat Publikasi Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI, 1994), hlm. 5.

⁸ Sunarjo, Djoenacsih S, Sunarjo, *Op.cit.*, hlm. 41.

mengajak dan membimbing untuk mempengaruhi atau membujuk orang guna menerima suatu pandangan, sentimen, idea atau nilai.⁹ Propaganda bertujuan untuk menanamkan “komunikasi subyektif”, bukan “komunikasi obyektif”. Qualter memberikan definisinya tentang propaganda sebagai berikut.

*Propaganda is the deliberate attempt by some individual or groups to form, control or alter the attitudes of other groups by the use of the instruments of communication with the intention that in any given situation the reaction of those so influenced will be that desired by the propagandist.*¹⁰

Propaganda adalah usaha yang disengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, mengontrol atau mengubah sikap dari kelompok lain dengan menggunakan instrumen komunikasi dengan penemuan bahwa dalam situasi tertentu reaksi dari mereka akan dipengaruhi sebagaimana yang diinginkan oleh propagandis.

Teknik komunikasi yang dipergunakan dalam propaganda adalah teknik *bandwagon*, yakni suatu cara persuasi dengan cara generalisasi untuk memengaruhi gerakan massa dengan mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh komunikator telah diterima oleh seluruh masyarakat. Teknik *bandwagon* bertujuan merangsang komunikannya dengan jalan agar mengikuti sikap pendapat dan tingkah laku orang terbanyak (mayoritas).¹¹

Propaganda yang sama pernah dijalankan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Propaganda merupakan kewajiban pokok dan salah satu yang paling penting dalam pemerintahan militer sejak awal mula pendudukan Jepang. Begitu pentingnya propaganda, sampai-sampai pemerintah

pendudukan Jepang membentuk *Sendenbu* (Departemen Propaganda) di dalam badan pemerintahan militer (*Gunseikanbu*) pada bulan Agustus 1942.¹² Pemerintah militer Jepang memanfaatkan media propaganda seperti film yang diputar secara berkeliling ke kota-kota di pulau Jawa, drama, wayang, tari-tarian, *Kamishibai*,¹³ nyanyian, dan penggunaan media elektronik radio.¹⁴

II. DALANG DALAM LINGKARAN PROPAGANDA PEMBANGUNAN ORDE BARU

A. Kilas Balik Orde Lama

Sejarah mencatat, pemerintahan Presiden Soekarno memberi perhatian khusus pada pelestarian seni tradisional wayang kulit. Pada tanggal 23 hingga 28 Agustus 1958 diselenggarakan Kongres Pedalangan Indonesia di Prang Wedanan Kompleks Kraton Mangkunegaran, Surakarta.¹⁵ Kongres tersebut sekaligus untuk menyempurnakan lembaga pewayangan “Panunggaling Dalang Republik Indonesia” (PADRI) yang didirikan pada 6 Desember 1953.¹⁶

Selain itu, pagelaran wayang kulit dijadikan sebagai media untuk mempropagandakan kebijaksanaan pemerintah seperti kampanye buta huruf, manipol Usdek, kampanye buta huruf, Manipol Usdek UUD 1945 dan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.¹⁷ Suharsono Hadisuseno, seorang pegawai Penerangan RI dari Yogyakarta, sekitar tahun 1948 turut berkontribusi menciptakan wayang gaya baru bernama Wayang Pancasila. Dengan mengacu pada tokoh-tokoh Wayang Purwa, Wayang

⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁰ Santoso Sastropetro, *Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa* (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), hlm. 30.

¹¹ Sunarjo, Djocnaesih S. Sunarjo, *Op. cit.*, hlm. 10.

¹² Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, terjemahan Hermanwan Sulistyono (Jakarta: PT Grasindo, 1993), hlm. 229.

¹³ *Kamishibai* adalah seni panggung yang mempertunjukkan kisah bergambar gaya Jepang dan biasa dipentaskan di kalangan anak-anak Jepang.

¹⁴ Aiko Kurasawa, *Op. cit.*, hlm. 241-255.

¹⁵ Sri Mulyono, *Wayang Asal-Usul, Filsafat, dan Masa Depan* (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hlm. 110.

¹⁶ Hampir semua dalang di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi anggota PADRI. Kursus pedalangan di berbagai kota seperti Kendal, Pekalongan, Semarang, dan sebagainya, mulai bermunculan. *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁷ Kanti Walujo, *Op. cit.*, hlm. 25.

Pancasila dipergunakan untuk menyajikan cerita-cerita yang berhubungan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dan peristiwa-peristiwa kemerdekaan RI. Adapun tujuan pertunjukan Wayang Pancasila adalah untuk memberikan pencerangan mengenai falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar serta Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹⁸

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, semua partai politik paham untuk memanfaatkan pertunjukan wayang kulit untuk tujuan propaganda. Partai-partai tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai Pandawa “yang berada dalam pihak yang benar” dalam cerita Mahabharata.¹⁹ Partai Komunis Indonesia (PKI) bahkan memperlihatkan perhatian yang semakin besar terhadap peranan potensial dalang di dalam menggerakkan rakyat untuk tujuan-tujuan kepartaian.²⁰

B. Dalang di Bawah Orde Baru

Pertunjukan wayang kulit pada masa pemerintahan Orde Baru lebih condong kepada alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan nasional, dan administrasi.²¹ Peranan strategis kesenian tradisional dalam penyampaian pesan-pesan pemerintah ini dilatarbelakangi oleh kesulitan elit birokrasi pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang baru terbentuk kepada rakyat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Asrul Sani sebagai berikut.

Di satu pihak demi pembaruan yang

harus mereka laksanakan dibutuhkan suatu sistem nilai yang baru, tetapi pada pihak lain kaum cendekiawan baru ini harus memelihara adanya komunikasi intensif dengan rakyat. Komunikasi ini menuntut adanya beberapa sistem nilai tertentu.²²

Ada beberapa jenis kesenian tradisional seperti karawitan, *santi swaran*, wayang (orang, kulit, golck), *guyon maton*, ndolalak, lagu pop, seni tari, *macapat*, sandiwara, dan ketoprak²³ yang memiliki kekuatan dalam menyampaikan propaganda pada era Orde Baru. Dari beberapa bentuk kesenian tradisional tersebut, media komunikasi tradisional yang paling mudah disisipi propaganda (termasuk pesan-pesan P4), dipahami dan diminati masyarakat adalah jenis seni budaya yang ada dialognya seperti *guyon maton*, wayang, sosio drama, dan ketoprak.²⁴ Salah satu media kesenian tradisional yang efektif dipergunakan oleh pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakannya adalah kesenian tradisional wayang kulit, karena wayang kulit merupakan warisan budaya leluhur yang eksistensinya telah mengakar terutama di kalangan orang Jawa, baik golongan elit maupun rakyat biasa.²⁵ Selain itu, seni pedalangan, khususnya di Jawa, telah terbiasa berbaur dengan otoritas yang memengaruhinya.²⁶

Pasca gerakan 30 September 1965 yang gagal dilakukan dan berlanjut dengan pembersihan oknum-oknum PKI, hal yang sama juga terjadi di kalangan dalang. Mereka yang tidak terbunuh atau lolos dari penangkapan kemudian dikenai larangan bermain selama jangka waktu tertentu. Seluruh dalang juga

¹⁸ S. Haryanto, *Op.cit.*, hlm. 122.

¹⁹ Marshall Alexander Clark, *Wayang Mbeling: Sastra Indonesia Menjelang Akhir Orde Baru* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2008), hlm. 23.

²⁰ Victoria M. Clara van Groenendaal, *Dalang di Balik Wayang* (Jakarta: PT Temprint, 1987), hlm. 219.

²¹ Suhartoyo dalam Kanti Walujo, *Op.cit.*, hlm. 27.

²² Asrul Sani, dalam Victoria M. Clara van Groenendaal, *Dalang di Balik Wayang* (Jakarta: PT Temprint, 1987), hlm. 210.

²³ “Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemasarakatan dan Pembudayaan P4 Di Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah Tahun 1995/1996,” BP7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 1996, hlm. 25, Kanwil Deppen Prov. Jateng, Arsip Provinsi Jawa Tengah.

²⁴ “Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemasarakatan dan Pembudayaan P4 di Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah Tahun 1996 1997”, BP7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1996/1997, Kanwil Deppen Prov. Jateng, Arsip Provinsi Jawa Tengah.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 211.

²⁶ Otoritas yang dimaksud antara lain otoritas istana atau keraton, otoritas lembaga-lembaga pendidikan formal pedalangan, otoritas tradisi lokal para dalang, otoritas para dalang populer atau dalang laku, hingga otoritas penguasa orde yang sedang berkuasa dalam hal ini Orde Baru. Lihat Soetarno, Sarwanto, *Wayang Kulit dan Perkembangannya*, (Solo: ISI Press, 2010), hlm. 203.

diwajibkan untuk mendaftarkan diri, melaporkan rencana pagelaran hingga menyerahkan sinopsis lakon yang hendak dipergelarkan kepada otoritas setempat.²⁷

Organisasi Himpunan Kebaktian Dalang menjadi organisasi dalang pertama pada masa Orde Baru, yang didirikan atas hasil konferensi 80-an peserta pada 18 dan 19 Desember 1966 di Surakarta.²⁸ Tiga tahun sesudahnya, atau pada 1969, diselenggarakan Pekan Wayang Indonesia pertama. Ada beberapa keputusan yang dihasilkan, salah satunya menjadikan pertunjukan wayang sebagai *mass media* guna menyukseskan REPELITA.²⁹

Pembentukan Lembaga Pembinaan Seni Pedalangan Indonesia (GANASIDI) pada tanggal 7 Desember 1969 memperlihatkan secara jelas keterlibatan pemerintah terhadap seni pedalangan. Orientasi yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan dalang sebagai guru bagi masyarakat³⁰ turut melatarbelakangi berdirinya lembaga yang berpusat di Semarang ini. GANASIDI memiliki *Sad Satya Dharma* atau program dalang yang salah satunya menekankan fungsi dalang sebagai abdi negara yang harus mengutamakan kepentingan nasional dan berkiblat kepada Garis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.³¹

GANASIDI disahkan pada hari terakhir Konferensi Seni Pedalangan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 10 hingga 12 Juli 1969. GANASIDI menghimpun seluruh dalang bahkan siapapun yang memiliki keterikatan dengan seni pedalangan, dengan syarat, Warga Negara Indonesia, tidak termasuk anggota organisasi terlarang, dan tidak terlibat dalam Gerakan

30 September.³² Tujuan dibentuknya GANASIDI adalah untuk membina mutu pedalangan sebagai sarana pendidikan dan bimbingan watak yang berjiwa Pancasila.³³

Pada pemilu pertama era Orde Baru, pada tahun 1971, banyak dalang lokal yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye pemilu, dan ada yang menjadi populer sesuai dengan tingkat wilayah pentasnya. Dampak yang lebih luas lagi adalah ketika kerjasama antara aparat pemerintah dan dalang semakin erat. Dalang memandang setiap imbauan pemerintah sebagai “perintah yang tidak mungkin dibantah”. Akibatnya, dalam setiap pergelaran wayang kulit, dalang menonjolkan dan memperbanyak pesan-pesan maupun program-program pemerintah secara vulgar dan berlebihan. Situasi ini direformasi oleh penggarapan *pakeliran padat* yang menjadi respon atas *pakeliran* semalam suntuk yang dirasa mulai mengalami pendangkalan mutu karena sarat dengan pesanan, humor, sehingga tidak terlihat adanya kesesuaian antara cerita dengan pertunjukan. Oleh sebab itu, *pakeliran padat* bertujuan mengembalikan fungsi *pakeliran* sebagai sajian estetis dan artistik.³⁴

Munculnya *pakeliran padat* tidak berarti “titipan” kepada para dalang untuk menyampaikan propaganda politik berangsur mencair. Menjelang pemilihan umum 1977, di Sitinggil selatan kompleks Keraton Surakarta, pertunjukan wayang yang diselenggarakan dalam minggu pertama sejak diresmikan sebagai waktu dimulainya kampanye pemilu, memunculkan fakta baru. Lakon yang dipilih untuk ditampilkan adalah lakon *Ringin Kencana* yang sengaja ditulis untuk pemilu. Lakon *Ringin Kencana* menjadi “metafor” bagi lambang Golkar (pohon beringin), yang secara harafiah

²⁷ Victoria M. Clara van Groenendaal, *Op. Cit.*, hlm. 220.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 223.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

³⁰ Kaum elit baru mulai tertarik dengan peran dalang sebagai guru. Lihat Victoria M. Clara Van Groenendaal, *Op. Cit.*, hlm. 228.

³¹ Wawan Susetya, *Dhalang, Wayang, dan Gamelan* (Yogyakarta: Narasi, 2007), hlm. 29.

³² Butir ini dimuat dalam buku stensilan bertajuk Dwi Warsa Ganasidi yang terbit dalam rangka ulang tahun kedua GANASIDI. *Ibid.*, hlm. 229.

³³ Kanti Walujo, *Op. Cit.*, hlm. 125.

³⁴ Bambang Murtiyoso, dkk., *Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang* (Surakarta: Citra Ltmika Surakarta, 2004), hlm. 35-38.

berarti “Beringin Emas”. Pergelaran tersebut dipandang sebagai pernyataan dukungan keraton terhadap Golkar secara terbuka.³⁵

Peranan dalang semakin dimantapkan dalam Sarasehan Dalang Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 24 Juli 1986. Prospek utama penyelenggaraan sarasehan tersebut adalah untuk meningkatkan peranan dalang pewayangan guna menyukceskan Pemilu 1987 dalam rangka memantapkan demokrasi Pancasila.³⁶ Pada momentum yang sama, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat itu, Suparjo Rustam, dalam pengarahannya tertulis mengemukakan bahwa peranan penting yang dapat diambil oleh dalang sebagai inovator dan motivator pembangunan tidak disia-siakan dengan membiarkan seni wayang sekedar sebagai hiburan. Beliau juga menegaskan keharusan dalang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman sebagai upaya mendekati aspirasi pembangunan yang terus berkembang melalui cerita wayang.³⁷ Pemikiran tersebut selaras dengan paparan dalam Kongres Kebudayaan 1991 yang menyebut perlunya peningkatan terhadap kritik seni serta kebebasan seniman untuk mencipta, memamerkan hasil karya, dan kebebasan rakyat untuk menikmatinya.³⁸

Kemudian pada Sarasehan Dalang Indonesia yang diselenggarakan di TMII, 8-11 Februari 1996, disampaikan bahwa fungsi seni pedalangan harus menyentuh aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para dalang harus memiliki kesragaman gaya, dengan materi bertumpu kepada sepemahaman seperti yang terbungkus dalam P-4. Sarasehan ini mempola pemahaman pikiran para dalang tentang P-4. Diharapkan dalam membawa misi P-4 para dalang tidak merusak

pertunjukan wayang.³⁹ Begitu lekatnya dominasi pemerintah terhadap dalang, Clark menyebut, kooptasi atas wayang banyak dilakukan terkait upaya Orde Baru untuk memaksakan dan menjaga otoritas sosial dan politik. Wayang menjadi salah satu tempat produksi bentuk baru informasi negara.⁴⁰ Hal ini dibuktikan dengan pidato pengarahannya dari DPP Golkar pada Sarasehan Dalang Pewayangan Seluruh Indonesia 1986 sebagai berikut,

Peranan dalang dalam pembangunan menurut hemat kami bukanlah sekedar menyampaikan informasi pembangunan tetapi sekaligus mengangkat aspirasi masyarakat untuk diserap oleh lembaga-lembaga pengambil keputusan. Dengan demikian dalang bukan hanya memberikan pesan-pesan pembangunan dari atas tetapi juga menyalurkan keinginan dan harapan masyarakat dari bawah.⁴¹

Pada bagian akhir sambutan, DPP Golkar juga mengajak kepada seluruh dalang untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 1987 sebagai berikut,

Kepada para dalang yang sekarang ini sedang mengikuti sarasehan maupun yang tak sempat hadir dalam pertemuan yang berbahagia ini, kami sangat mengharapkan untuk ikut berjuang bersama-sama GOLKAR memenangkan PEMILU 1987.⁴²

Pengkooptasian berlebihan yang dilakukan pemerintah dan partai pemerintah tersebut mengundang respons dari beberapa dalang. Salah seorang dalang asal Boyolali, Ki Sayoko misalnya, pernah menegaskan, apabila ingin “laris” pada masanya dan lekas populer, seorang dalang harus memiliki kedekatan dengan pemerintah, seperti masuk Golkar, menjadi anggota organisasi pedalangan (Ganasidi, Pepadi, Senawangi), dan dekat dengan pejabat.⁴³ Tidak meng-

³⁵ Victoria M. Clara Van Groenendaal, *Op. Cit.*, hlm. 204.

³⁶ S. Haryanto, *Op. Cit.*, hlm. 227.

³⁷ S. Haryanto, *Ibid.*

³⁸ Mukti Ali, “Etika dalam Politik Kebudayaan,” dalam Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat I, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya 1992-1993.

³⁹ “Wayang, Antara Tontonan dan Tuntunan,” dalam *Suara Merdeka*, 10 Februari 1996.

⁴⁰ Marshall Alexander Clark, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁴¹ Hasil Sarasehan Dalang Pewayangan Seluruh Indonesia tahun 1986, dalam Bambang Murtiyoso, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 44.

⁴² *Ibid.*

herankan apabila kemudian dalang terjerumus sebagai alat propaganda, khususnya kesediaan dan mungkin keterpaksaan untuk menjadi agen pemerintah. Dampak buruk selanjutnya adalah hilangnya independensi, kreativitas dan produktivitas seorang dalang. Inovasi yang berkembang kemudian tidak mengakomodasi perkembangan zaman yang sesungguhnya melainkan terbatas pada teknis pedalangan semata. Jagat pedalangan menjadi wadah legitimasi kekuasaan dan dipenuhi dengan tatanan (*order*) dan ketaatan (*obedience*).⁴⁴

Seniman Semarang yang juga bergelut di dunia wayang kulit pada era Orde Baru, Mas Ton, menuturkan, penyampaian pesan-pesan pembangunan yang dilakukan oleh para dalang pada saat itu tidak menjadi masalah. Bagi Mas Ton, sudah menjadi kewajiban dan kewajiban bahwa tugas seorang dalang adalah menyampaikan misi-misi pemerintah. Misi pemerintah itu adalah menyampaikan visi sebuah bangsa yang merdeka, dinamis, dan mempunyai cita-cita untuk mengembangkan negaranya. Dari netralitas dalang, bagi Mas Ton, dalang akan sangat memahami posisinya ketika menceritakan misi dari hasil pembangunan sebuah negara. Seorang dalang tidak melihat “saya dari kelompok A”, atau “partai B”. Artinya, dalang berdiri netral ketika menyampaikan hasil pembangunan sebuah bangsa.⁴⁵

Jazuli menilai setidaknya ada tiga kepentingan yang akan diwujudkan pemerintah Orde Baru melalui kooptasinya terhadap para dalang. Tiga kepentingan tersebut yakni,

a. Pemerintah menghendaki agar dalang bertugas sebagai juru penerang yang

piawai dalam pengolah unsur-unsur ekspresi pedalangan. Dengan demikian sangat besar kemungkinan untuk dijadikan sarana komunikasi politik yang strategis. Dalang menjadi alat propaganda pemerintah (propagandis), sebagai reproduktor. Hal ini relevan dengan sistem budaya komunikasi model *top down* yang dipakai pemerintah Orba.

b. Anggapan pemerintah atas peranan dalang sebagai guru masyarakat (emansipator) tentang nilai-nilai spiritual, etika (moral), dan estetika merupakan cara yang taktis dan jitu untuk menghaluskan (mensiasati) pesan guna menunjang program dan kebijakan pemerintah. Pesan-pesan pembangunan yang diekspresikan dalang melalui dialog atau humor antar tokoh wayang, dengan bahasa sindiran, isyarat, teka-teki, pantun, dan sebagainya, dipandang dapat diterima oleh rakyat.

c. Pemerintah sangat menghendaki agar dalang mampu berperan sebagai jembatan penghubung dengan rakyat tanpa menimbulkan gejolak. Oleh karenanya dalang harus akomodatif agar mampu menyalurkan dan membantu meredakan ketegangan, perbedaan kepentingan yang terjadi di kalangan masyarakat maupun dalam hubungannya dengan negara, seperti penciptaan ritual kenegaraan melalui lakon-lakon wayang untuk menghegemoni rakyat.⁴⁶

Dalam hasil penelusuran sumber lisan yang dilakukan penulis, sejumlah dalang di Semarang mengaku tidak bertentangan dengan apa yang diinstruksikan pemerintah. Ki Djoko Hadiwidjojo misalnya, termasuk dalang yang sejalan dengan ideologi pemerintah.

⁴³ Pada tahun 1990-an Ki Anom Suroto dan Ki Manteb Soedharsono pernah dicalonkan sebagai kader Golkar. Namun dalam wawancara penulis dengan putra sulung Ki Anom Suroto, Ki Jatmiko, Ki Anom Suroto tidak bergabung menjadi anggota partai (Golkar), namun memang sering dimanfaatkan Golkar. *Event-event* seperti kampanye, penyampaian pesan pembangunan, adalah *event* yang sering menampilkan Ki Anom Suroto. Dalam literatur lain diungkap bahwa Ki Anom dikenal dekat dengan tokoh-tokoh politik di masa Orde Baru. Tidak dipungkiri pula bahwa ini menjadi salah satu pendukung popularitas Ki Anom. Karena dianggap piawai memontaskan seni pedalangan, para tokoh politik pun memanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Menurut beliau, saat itu setiap dalang diminta menjadi alat propaganda partai. Wayang baginya tetap universal. Adapun masalah pembangunan merupakan masalah universal sehingga dapat dilebur ke dalam pementasan wayang. Lihat Bram Setiadi, Amin Pujianto, *DalangKu*, (Jakarta: CV Cendrawasih Asri, 2011), hlm. 8.

⁴⁴ M. Jazuli, *Dalang, Negara, Masyarakat: Sosiologi Pedalangan* (Semarang: Lintang, 2003), hlm. 148-152.

⁴⁵ Wawancara dengan Mas Ton, 6 Maret 2014.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 154.

Waktu itu ideologinya ya sama. Karena kesadaran sendiri. *Wong* itu sadar saya apa, karena jaman pak Harto yang namanya 4 schat 5 sempurna semua rakyat bisa. Semua rakyat mampu, dan sudah pernah Indonesia jadi singanya ASEAN. Waktu itu saya setuju karena saya dibesarkan oleh G o l k a r . Golkar *ora baen-baen* untuk memakmurkan para dalang. Saya mendukung Golkar.⁴⁷

Kesamaan ideologi Ki Djoko dengan partai pemerintah juga diperlihatkan ketika beliau berada dalam satu pentas bersama dengan Ki Manteb Soedharsono di Semarang. Ki Djoko melakukan kritik terhadap dalang yang mengenakan baju "merah" yang dapat berkonotasi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang bersaing dengan Golkar. Sebaliknya, Ki Manteb Soedharsono bersikap netral, enggan "menguning", "memerah", atau "menghijau" secara ideologis sebagaimana yang dilakukan Ki Djoko Hadiwidjojo. Ki Manteb juga tidak segan mengeluarkan kritikan kepada pemerintah Orde Baru.

Kalau kritik-mengkritik itu sejak jaman dulu. Sudah mengkritik. Wah saya dulu, saya dulu sampai *digethingi* pak Wardi (Gubernur Jawa Tengah-red) lho. Karena saya *ngritik rada* keras, *gitu lho*. Saya *kan nggak* mau di-kuningisasi, itu saya *nggak mau*. *Sing kuning ya kuning-a, sing ijo ya ijo-a, sing abang ya abang-a*. Marilah kita bersama-sama. Katanya membangun Jawa Tengah, ya ayo kita bangun lewat profesi masing-masing. *Gitu*. Ya saya pakai kuning, pakai merah, pakai ijo, *sak senengku*. Dalang itu bukan miliknya partai. Dalang bukan milik siapapun, ini miliknya bangsa.⁴⁸

III. TEKNIK PENYAMPAIAN PROPAGANDA PEMBANGUNAN OLEH DALANG

Dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan terdapat tiga cara yang umum dipergunakan, antara lain:

a) *Melok*, yaitu penyampaian pesan pembangunan yang bersifat vulgar, *wadhag*, jelas, tanpa perlu mengemas dalam bentuk bahasa pedalangan. Dalang dapat langsung mengemukakan pesan pembangunan sesuai dengan nama programnya. Dalam adegan *jejer* pertama, apabila dalang menyampaikan pesan pembangunan secara *melok* akan menurunkan nilai estetika dan melanggar konvensi pedalangan. Cara penyampaian pesan secara *melok* dapat dilakukan pada adegan *limbukan* dan *gara-gara*.

b) *Medhang miring* yaitu penyampaian pesan pembangunan dengan bahasa pedalangan namun masih ada unsur-unsur *melok*-nya. Jadi sifatnya setengah *melok*. Penyampaian pesan pembangunan dalam *janturan*, *pocapan*, dan *sulukan* sebaiknya dilakukan dengan cara ini dan cara *nyampar pikolih*.

c) *Nyampar pikolih* yaitu penyampaian pesan pembangunan dengan kemasan bahasa seni pedalangan. Pesan ini disampaikan secara halus, bersifat implisit dengan tidak terlihat unsur-unsur *wadhag*-nya. Pada *jejer* pertama, penyampaian pesan pembangunan dengan cara ini amatlah tepat.⁴⁹

Contoh penyampaian pesan pembangunan dengan teknik *melok* dan *medhang miring* antara lain nampak pada dialog antara Semar dan Parikesit dalam lakon *Semar Mbabar Jatidiri*⁵⁰ seperti berikut,

SEMAR

Den... gesang kula wiwit jahang bayi ngantos gerang niki mpun ngalami urip, pinten-pinten tataran lan jaman. Dados meh sedaya kahaman saged kula sumerapi lan tansah kula eling-eling. Wiwit jaman Prabu Harjunasasra ing Maespati, Prabu Rama ing Pancawati dalah para Pandhawa sak leuluhure, niku pun kula suwitani sedaya. Gumelaring nagari Yawastina ingkang dumadi saking pinten-pinten laladan saha warni-warnining suku, adat, budaya lan kapitayan menika, tansah dipun udi lan

⁴⁷ Wawancara dengan Ki Djoko Hadiwidjojo tanggal 18 April 2014.

⁴⁸ Wawancara dengan Ki Manteb Soedharsono, 13 Maret 2014.

⁴⁹ Mochadi, et. al., "Laporan Akhir Penelitian tentang Potensi Pergelaran Wayang Purwa dalam Pembangunan" (Laporan Penelitian Kerjasama Bappeda Tingkat I Jawa Tengah dengan Fakultas Sastra Undip 1994/1995), hlm. 117-118.

⁵⁰ Tim Delapan PEPADI Pusat, *Naskah Lakon Wayang Kulit Purwa Semar Mbabar Jati Diri* (Jakarta, 1995).

dipun budidaya, amrih sagedipun manunggal. Awit inggih namung kamanunggalaning nusa lan bangsa menika, ingkang saged mujudaken karaharjan lan kamakmuraning sagung bebrayan. Tekat menika sampun kawahya ing salebeting sesanti "BHINEKA TUNGGAL IKA, TAN HANA DHARMA MANGRUWA". Tegesipun senadyan bebrayan punika nyatanipun bedabeda nanging tetep rumaos manunggal ing bebrayan ageng nusantara. Bebrayan ageng ingkang manunggal, saiyeg saeka kapti nindakaken darma luhur tumuju wujuding bebrayan lan nagari ingkang lestari, rahayu, adil lan makmur lahir trusing batin. Darma luhur punika, estunipun wiwit jaman kina makina sampun wonten ing bebrayan nusantara, wusana kasembadan dipun cipta dening para Pandawa dados gegebengan lima ingkang minangka angger ugeraning negara.

E, inggih, supados tansah enget gegebengan gangsal punika,

- Manambah marang Gusti Kang Maha Tunggal
- Raos kamanunggalan kang satuhu
- Manunggaling Nusantara
- Rembag sarujuk wakile para kawula
- Adil warata murakabi sadaya kawula.

Gangsal gegebengan punika bebasan aji pamungkas, gegamane para narapraja sarta para kawula mujudake negara adil lan makmur.

PARIKESIT

Lima gegebengan angger ugering negara iku tetep dadi lelandesan sarta gegayuhane negara Yawastina, wa.

SEMAR

E inggih sukur nek ngoten, ning sing wigatos kedah dipun ugemi sarta dipun tindakaken lire kudu dingerteni kanthi mandes lan dipun dicakake wonten urip sampeyan saben dinane. Nindakaken darma ingkang awujud gangsal gegebengan punika boten gampil, wonten cara ingkang kedah dipun tempuh inggih punika lelantaran "Ekaprasetya Pancasila" ingkang ateges manunggaling tekad mujudaken gangsal gegebengan ing salebeting gesang pribadi, bebrayan sarta negari. Gangsal paugeran ingkang sayekti minangka darmaning para narapraja dalah kawula sampun kandeg ing lati nanging supados tumus ing pakarti. Dene ingkang dados kuncine Ekaprasetya Pancakarsa punika inggih namung "kendali diri", lire saged angendaleni diri dumateng sadaya

obah musiking hawa nafsu, mesu hawa nafsu ingkang utama, mbengkas hawa nafsu ingkang nista.

Kendali diri ingkang minangka kunci Ekaprasetya Pancakarsa punika inggih sakalangkang angel kagayuh, sabab kita kedah mangertos punapa lan kados pundi rekadayanipun. Lha, supados saged angendaleni diri, manungsa kedah nyumurupi "jati diri".

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia :

SEMAR

Tuan, hidup saya sejak bayi sampai tua seperti sekarang sudah mengalami berbagai zaman. Jadi hampir semua keadaan bisa saya ketahui dan selalu saya ingat. Sejak zaman Prabu Harjunasasara di Maespati, Prabu Rama di Pancawati begitu juga dengan para Pandhawa dan leluhurnya, itu sudah saya alami semua. Negeri Yawastina yang terjadi dari banyak tempat dan bermacam suku, adat, budaya dan kemampuan itu, selalu dijaga supaya bisa bersatu. Karena memang hanya dengan persatuan nusa dan bangsa itulah yang bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tekad tersebut sudah terwakili dalam semboyan BHIHNEKA TUNGGAL IKA, TAN HANA DHARMA MANGRUWA. Artinya walaupun berbeda-beda namun tetap merasa satu di dalam nusantara. Rakyat yang bersatu, bersama-sama melaksanakan darma menuju terwujudnya rakyat dan negeri yang lestari, sejahtera, adil dan makmur lahir maupun batin. Darma tersebut, sebetulnya sudah ada sejak zaman orang-orang kuno hidup di nusantara, kemudian tercapailah apa yang dicipta Pandhawa menjadi lima dasar yang menjadi dasar negara.

Baiklah, supaya selalu mengingat lima dasar tersebut,

- Bertuhankan pada Tuhan Yang Maha Esa
- Rasa kemanusiaan yang sejati
- Bersatunya Nusantara
- Musyawarah dan mufakat para wakil rakyat
- Adil merata menaungi seluruh rakyat

Lima dasar tersebut seolah seperti aji pamungkas, senjata para pejabat pemerintah dan rakyat mewujudkan negara yang adil dan makmur.

PARIKESIT

Lima dasar negara itu tetap menjadi landasan dan tujuan negara Yawastina, paman.

SEMAR

Syukurlah kalau begitu, namun yang penting, harus ditaati dan dilakukan sehingga harus dipahami secara benar dan diwujudkan dalam hidupmu setiap harinya. Melaksanakan darma yang berwujud lima dasar itu tidak mudah, ada cara yang harus ditempuh yakni melalui Ekaprasetya Pancakarsa yang berarti bersatunya tekad mewujudkan lima dasar di dalam hidup pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Lima peraturan sebagai darma para pejabat pemerintah maupun rakyat jangan hanya di bibir saja melainkan terwujud juga dalam budi pekertinya. Adapun yang menjadi kunci Ekaprasetya Pancakarsa hanyalah kendali diri, yang bisa mengendalikan diri terhadap perubahan hawa nafsu, mengutamakan hawa nafsu yang baik, mencegah hawa nafsu yang buruk. Kendali diri yang seperti itu sebagai kunci Ekaprasetya Pancakarsa memang agak sulit dicapai, karena kita harus mengerti apa dan seperti apa kepura-puraan yang ada. Supaya bisa mengendalikan diri, manusia harus mengetahui "Jatidiri".

Selain itu penyampaian pesan-pesan pembangunan dapat pula dilakukan melalui lakon-lakon pewayangan yang sengaja dibuat untuk kepentingan tersebut ataupun melalui *gara-gara* dan *limbukan*. Lakon-lakon yang memiliki pesan-pesan pembangunan secara eksplisit semisal pada lakon dengan repertoar *mBangun* dan *kridha*. Untuk repertoar *mBangun* dapat dijumpai lakon-lakon seperti *mBangun Candi Saptarangga* dan *mBangun Taman Maerakaca*. Adapun lakon garapan antara lain *mBangun Ngastina*, *Semar mBangun Kahyangan*, *Semar mBangun Gedhong Kencana*, *Semar mBangun Klampis Ireng*. Sementara itu, untuk repertoar *kridha* dapat ditemukan melalui lakon *Gathukaca Kridha*, *Bima Kridha*, dan *Narayana Kridha Brata*.⁵¹

IV. PROPAGANDA PEMBANGUNAN OLEH DALANG DI SEMARANG

Walikota Semarang Soetrisno Soeharto memprogramkan pementasan wayang kulit di sembilan kecamatan. Keputusan ini diambil dalam sarasehan bertema "Peran

Dalang dalam Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa demi Suksesnya Sidang Umum MPR 1993". Pentas rutin yang digelar di sembilan kecamatan tersebut tidak bertujuan untuk menghidupi para dalang tetapi dimaksudkan untuk mengembangkan moral pejabat dan masyarakat lewat pertunjukan wayang. Kesempatan pentas di kecamatan tersebut diharapkan sebagai wadah sambung rasa antara Muspida dengan camat dan lurah serta masyarakat setempat. Oleh sebab itu, dalang dan seniman yang tampil harus memahami tujuan diadakannya pementasan tersebut yakni membentuk sikap dan mental para pejabat dan rakyat.⁵²

Sebagai media komunikasi massa yang bertujuan menanamkan visi misi pembangunan Orde Baru, pergelaran wayang kulit di Kota Semarang pada saat itu tidak hanya berkuat pada gubahan lakon atau penyisipan pesan-pesan pembangunan melalui adegan-adegan pertunjukan. *Gendhing-gendhing* bernuansa pembangunan juga diciptakan pada periode yang sama. *Gendhing-gendhing* tersebut banyak yang diciptakan oleh maestro seni pedalangan Ki Narta Sabda. Berdasarkan pengamatan penulis, *gendhing-gendhing* bernuansa propaganda pembangunan yang "dihidupkan" pada kurun waktu 1986 hingga 1998 pada pergelaran wayang kulit di Kota Semarang masih bisa ditemui di pustaka musik RRI Semarang. *Gendhing-gendhing* tersebut antara lain,

- 1) *Lancaran Identitas Jawa Tengah*, dibawakan oleh Karawitan Condhong Raos (pimpinan Ki Nartasabda) yang direkam tahun 1989.
- 2) *Ladrang Ambangun laras pelog pathet nem*, dibawakan oleh Karawitan Condhong Raos yang direkam tahun 1985.
- 3) *Lelagon Aja Dipleroki laras pelog pathet nem*, dibawakan oleh Karawitan Condhong Raos yang direkam tahun 1979.
- 4) *Lelagon Semarang Endah laras pelog*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 118-119.

⁵² "Wali Kota Programkan Pentas Wayang Kulit di 9 Kecamatan," dalam *Suara Merdeka*, 10 Oktober 1992.

pathet nem, dibawakan oleh Karawitan Condhong Raos (tanpa tahun).

5) *Lelagon Sarwa Sarwi Semarangan laras slendro pathet nem*, dibawakan oleh Karawitan Condhong Raos (tanpa tahun).

6) *Lelagon Praon laras pelog pathet nem*, dibawakan oleh Karawitan Condhong Raos yang direkam tahun 1978.

7) *Ladrang KB Bagya kalajengaken ketawang Basonto trus lelagon Mari Kangen laras pelog pathet nem*, dibawakan oleh Karawitan Studio RRI Semarang (tanpa tahun).

Berikut kutipan lirik gending bernuansa pembangunan *Ladrang Ambangun laras pelog pathet nem*.

Wancine ambangun, sayuk guyup rukun, tuwa mudha ayo ca makarya ambangun negara cancut taliwanda. Ambangun desa ambangun jiwa, manunggaling cipta rasa budi karsa, mrih luhuring nagara, sarta bangsa. Kalis sambekala Indonesia merdeka.

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

Waktunya membangun, seja sekata, tua muda mari bekerja, menyingsingkan lengan baju membangun negara, membangun desa, membangun jiwa, manunggalnya rasa, cipta, budi karsa, demi keluhuran negara serta bangsa, lepas aral melintang Indonesia Merdeka.⁵³

Gubernur Jawa Tengah, Socwardi, yang menjabat dari 1993 hingga 1998, juga memiliki perhatian terhadap seni pedalangan. Bagi Gubernur Socwardi, pementasan wayang kulit sangat strategis untuk media informasi. Sebab lewat kesenian itu bisa dislipkan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Kesenian

wayang kulit mulai rutin dilakukan sebulan sekali tiap *malem pitulasan* di halaman kantor gubernur. Gubernur selalu mengecek, baik menyangkut lakon, dalang, maupun teknis penyelenggara. Salah satu organisasi yang turut andil dalam penyelenggaraan rutin pentas wayang kulit adalah Panitia Tetap (Pantap) Apresiasi dan Pengembangan Seni Pewayangan sejak tahun 1989. Dampak besar dari pentas wayang ini adalah tingginya minat remaja untuk menyaksikan secara langsung.⁵⁴ Pemilihan tanggal tujuh belas atau *pitulas* sebagai tanggal penyelenggaraan pertunjukan wayang disebabkan atas tujuan pewarisan semangat kejuangan di kalangan generasi muda. Dari pertunjukan *malem pitulasan* ini Gubernur Soewardi menganggap pesan pemerintah mampu disampaikan para dalang. Pesan-pesan tersebut diharap dapat diserap oleh para lurah yang menyaksikan atau mendengar melalui TVRI atau RRI⁵⁵ untuk berikutnya disampaikan ke masyarakat di lingkungannya.⁵⁶ “Kuningisasi” yang radikal pernah diterapkan ke dalam pertunjukan wayang menjelang pemilu tahun 1997, di bawah pemerintahan Gubernur Socwardi.⁵⁷ Hal ini terlihat pada pementasan wayang dua *kelir* dengan atribut serba kuning, mulai dari dialog dalang, kursi, karpas, serta pakaian para dalang dan kru-nya.⁵⁸

Dalam bidang pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), seniman turut ditatar untuk menjadi penyuluh P-4. Sebagai misal, penyelenggaraan Saraschan Seniman dan Seniwati yang dilaksanakan per-wilayah pembantu Gubernur Jawa Tengah yang bertempat di Aula Sasana Krida Wiyata Kabupaten Pekalongan pada 1996. Para peserta

⁵³ Mochadi, et.al., “Laporan Penelitian tentang Potensi Pertunjukan Wayang Purwa dalam Pembangunan,” Kerjasama Bappeda Tk. I Jawa Tengah dengan Fakultas Sastra Undip 1994/1995.

⁵⁴ “Lewat Wayang Kulit Gubernur Padukan Tuntunan dan Tontonan,” dalam *Suara Merdeka*, 9 Februari 1996. Dalam IIUT ke-21 KORPRI, pertunjukan wayang kulit ditampilkan di Gradika Bhakti Praja. Lihat “Wayang Kulit di Gradika Bhakti Praja,” dalam *Suara Merdeka*, 28 November 1992.

⁵⁵ Selain pertunjukan *malem pitulasan*, pertunjukan serupa juga rutin diselenggarakan di RRI Semarang setiap Sabtu pertama. Lihat “Pertunjukan Wayang Kulit Berhadiah,” dalam *Suara Merdeka*, 6 Januari 1996.

⁵⁶ “Gubernur Socwardi: Saya Terharu Melihat Kesenian Tradisional,” dalam *Suara Merdeka*, 3 Februari 1996.

⁵⁷ M. Jazuli, *Dalang, Negara, Masyarakat: Sosiologi Pedalangan* (Semarang: Limpad, 2003), hlm. 201.

⁵⁸ Jaka Rianto, “Interaksi Seni Pertunjukan Wayang dan Politik,” dalam *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, hlm. 7 Diunduh pada 12 Agustus 2014.

sarasehan ada yang berasal dari kantor Depdikbud, staf Pertunjukan Rakyat Kantor Deppen Kota Semarang, hingga Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat dan Seni Budaya DPD II Golkar Kodya Semarang.⁵⁹

Sejak tahun 1989, dalang turut berperan dalam pemasyarakatan dan kebudayaan P-4. Keterlibatan ini dapat dilihat dalam Daftar Penatar P-4 angkatan LI (51) tahun 1988/1989. Dalam daftar Biro Pendidikan DPD I GANASIDI Provinsi Jawa Tengah tertulis nama R. Djoko Suranto, SH, sebagai salah satu penatar bersama dengan perwakilan instansi-instansi lain, termasuk perwakilan dari DPD Golkar.⁶⁰ Keterlibatan anggota GANASIDI sebagai penatar P-4 bukan sesuatu yang mengejutkan, sebab *Gara-gara* P-4 dan wayang kulit merupakan salah satu jenis seni budaya yang selama ini dimanfaatkan sebagai media kebudayaan P-4 dan dibina langsung oleh GANASIDI.⁶¹

Di wilayah Kota Semarang sendiri pernah dilangsungkan pertunjukan wayang kulit di Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Semarang Selatan, dengan dalang Ki Ngasiran Gondo Sugito.⁶² Kelurahan Wonotingal mulai masuk dalam daftar desa atau kelurahan pelopor P-4 tingkat Pratama tanggal 18 Desember 1988 dengan nomor registrasi 413.1.05/0839/88413.1.05 0839/88.⁶³ Namun demikian belum ditemukan keterangan lebih lanjut apakah ada keterkaitan antara pertunjukan wayang kulit yang diselenggarakan pada tahun 1992 tersebut dengan peran kelurahan Wonotingal sebagai kelurahan pelopor P-4. Akan tetapi jelas bahwa wayang benar-benar diakui sebagai salah satu media pemasyarakatan dan kebudayaan P-4 yang strategis hingga di

akhir tahun 1998.⁶⁴

V. PENUTUP

Pagelaran wayang kulit merupakan suatu medium propaganda yang potensial, karena memiliki beberapa unsur seni yang juga potensial. Pada unsur drama, seorang dalang membawa penonton untuk menghayati makna kefasafahan yang mendalam dari setiap lakon yang dipergelarkan. Oleh sebab itu dalang berperan besar dalam menyisipkan pesan-pesan propaganda. Pesan-pesan tersebut dapat disosialisasikan secara baik dalam *janturan*, *pocapan*, dan dialog antar tokoh. Adegan *limbukan* dan *gara-gara* yang sering dinanti juga tak luput dari target sosialisasi. Lakon-lakon baru juga dicipta untuk memperkaya media propaganda, seperti *Semar Mbabar Jatidiri*, *Rama Tambak*, *Ringin Kencana*, *Kalingga Bawana*, dan lainnya.

Pada seni sastra, Ki Dalang dapat membawa imajinasi penonton dan pendengar untuk merasakan kehidupan bernegara yang damai dan terbebas dari penjajahan pada bagian *janturan*. Begitu pun ketika menyampaikan *pocapan*, dalang dapat menyisipkan pesan-pesan seperti cinta Tanah Air atau kesadaran untuk menghayati dasar negara. Pada bagian *ginem*, penonton dan pendengar seolah dibawa hanyut dalam cerita. Di sinilah pesan-pesan propaganda sering disampaikan, baik dengan teknik *melok*, *medhang miring* atau *nyampar pikolih*. Pada era Orde Baru, biasanya pesan-pesan tersebut digunakan untuk mengkampanyekan Golkar dalam Pemilihan Umum, Keluarga Berencana (KB), modernisasi desa, penghayatan Korpri hingga eksistensi dwifungsi ABRI. Semen-tara pada seni suara

⁵⁹ Surat Dinas B.P7 DAII II Semarang kepada Kepala Kantor Deppen Kodya Semarang, Ketua DPD II Golkar Kodya Semarang, dan Kepala Kantor Depdikbud Kodya Semarang, 15 Januari 1996, Arsip Provinsi Jawa Tengah.

⁶⁰ Anggota Golkar yang juga menjadi penatar antara lain Gatot Hadiano Prabowo, Sekretaris DPD II Golkar Kab. Purbalingga. Lihat Daftar Penatar P-4 angkatan LI (51) tahun 1988-1989. Lampiran Keputusan Kepala BP-7 propinsi Dati I Jawa Tengah tanggal 23 Maret 1989, Arsip Provinsi Jawa Tengah. Prof. Drs. Suwadi Bustoni, MSc dari GANASIDI Jateng juga pernah menjadi pembicara dalam sarasehan P-4 yang mengambil judul "Peranan Seniman Seniwati dalam Menghadapi Abad 21 (Era Globalisasi)." Lihat Laporan Sarasehan Seniman dan Seniwati Tingkat Pembantu Gubernur Jawa Tengah wilayah Pekalongan tahun 1997, Arsip Provinsi Jawa Tengah.

⁶¹ Jawaban Questioner Evaluasi Kebudayaan P-4 di Dati II Se-Jawa Tengah Tahun 1995/1996 oleh BP7 tanggal 2 April 1996, Arsip Provinsi Jawa Tengah.

⁶² "Pentas Wayang Kulit di Wonotingal," dalam *Suara Merdeka*, 6 November 1992.

⁶³ Daftar Desa/Kelurahan Pelopor P-4 Kotamadya Dati II Semarang, 1988, Arsip Provinsi Jawa Tengah.

⁶⁴ Poin E (Seni Budaya) dalam Laporan Hasil Bivaluasi Pelaksanaan Pemasyarakatan dan Kebudayaan P4 Di Daerah Tingkat II Se-Jawa Tengah Tahun 1997/1998, BP7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1997-1998, Arsip Provinsi Jawa Tengah.

dan karawitan, banyak gending-gending baru diciptakan dan diper-dengarkan dalam pertunjukan wayang untuk menciptakan suasana era pembangunan pada masa kepemimpinan Soeharto. Maestro Ki Narta Sabda sering menciptakan gending dengan nuansa Orde Baru yang kental, antara lain Ladrang Ambangun, Ladrang Sensus Pertanian, dan Lancaran Identitas Jawa Tengah.

Meski pada masa Orde Baru pertunjukan wayang kulit purwa harus dibatasi dengan berbagai kewajiban seperti keharusan memiliki surat izin *ndhalang* (mendalang), pembuatan sinopsis, hingga kejelasan identitas sebagai dalang, namun gaya

pedalangan dalam era Orde Baru telah menciptakan usaha-usaha untuk mendobrak kelanggengan yang melahirkan kreativitas. Kekurangmampuan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan mendorong pemerintah mencari jalan keluar atas kesukaran tersebut. Pemerintah menginginkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima secara baik, dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya eksistensi kesenian tradisional yang tumbuh dan mengakar di masyarakat luas menjadi jalan pemecahan masalah tersebut. Demikian halnya dengan wayang kulit purwa yang memiliki basis massa besar di Jawa Tengah. Penyampaian demi penyampaian dilakukan secara *blak-blakan* di samping

masih ada dalang yang memegang prinsip *pakem pedhalangan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Clark, M. A., 2008. *Wayang Mbeling : Sastra Indonesia Menjelang Akhir Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Daftar Desa /Kelurahan Pelopor P-4 Kotamadya Dati II Semarang, 1988, Arsip Provinsi Jawa Tengah.
- Daftar Penatar P-4 angkatan LI (51) tahun 1988/1989 Lampiran Keputusan Kepala BP-7 propinsi Dati I Jawa Tengah tanggal 23 Maret 1989, Arsip Provinsi Jawa Tengah.
- Groenendaal, V. M. C. van. 1987. *Dalang di Balik Wayang*. Jakarta: PT Temprint.
- "Gubernur Soewardi: Saya Terharu Melihat Kesenian Tradisional", *Suara Merdeka*, 3 Februari 1996.
- Haryanto, S. 1988. *Pratinimba Adhiluhung*. Jakarta: Djambatan.
- Jawaban Questioner Evaluasi Pembudayaan P-4 di Dati II Se-Jawa Tengah Tahun 1995/1996 oleh BP7 tanggal 2 April 1996, Arsip Provinsi Jawa Tengah.
- Jazuli, M. 2003. *Dalang, Negara, Masyarakat: Sosiologi Pedalangan*. Semarang: Limpad.
- "Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat IV", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai budaya 1992/1993.
- Kurasawa, A., 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Terjemahan Hermawan Sulistyono. Jakarta: PT Grasindo.
- Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemasyarakatan dan Pembudayaan P4 Di Daerah Tingkat II Se-Jawa Tengah Tahun 1997/1998, BP7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1997/1998, Arsip Provinsi Jawa Tengah.
- Laporan Sarasehan Seniman dan Seniwati Tingkat Pembantu Gubernur Jawa Tengah wilayah Pekalongan tahun 1997, Arsip Provinsi Jawa Tengah.
- "Lewat Wayang Kulit Gubernur Padukan Tuntunan dan Tontonan," *Suara Merdeka*, 9 Februari 1996.
- Moehadi, dkk., "Laporan Akhir Penelitian tentang Potensi Pertunjukan Wayang Purwa dalam Pembangunan" (Laporan Penelitian Kerjasama Bappeda Tingkat I Jawa Tengah

- dengan Fakultas Sastra Undip 1994/1995)
- Mulyono, S., 1978. *Wayang Asal-Usul, Filsafat, dan Masa Depan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Murtiyoso, B., dkk., 2004. *Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang*. Surakarta: Citra Etnika Surakarta.
- Naskah Lakon Wayang Kulit Purwa Semar Mbabar Jati Diri*, Tim Delapan Pepadi Pusat, Jakarta, 1995.
- “Pentas Wayang Kulit di Wonotingal”, dalam *Suara Merdeka*, 6 November 1992.
- “Pergelaran Wayang Kulit Berhadiah”, dalam *Suara Merdeka*, 6 Januari 1996.
- Rianto, J., “Interaksi Seni Pertunjukan Wayang dan Politik,” dalam *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*. Diunduh pada 12 Agustus 2014.
- Sastropoetro, S., 1991. *Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Setiadi, B. A. P., 2011. *DalangKu*. Jakarta: CV Cendrawasih Asri.
- Sunarjo, D. S. S., 1981. *Himpunan Istilah Komunikasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Surat Dinas B.P7 DATI II Semarang kepada Kepala Kantor Deppen Kodya Semarang, Ketua DPD II Golkar Kodya Semarang, dan Kepala Kantor Depdikbud Kodya Semarang, 15 Januari 1996, Arsip Provinsi Jawa Tengah.
- Susetya, W., 2007. *Dhalang, Wayang, dan Gamelan*. Yogyakarta: Narasi.
- Waluyo, K., 1994. *Peranan Dalang dalam Menyampaikan Pesan Pembangunan*. Jakarta: Direktorat Publikasi Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI.
- “Wayang Kulit di Gradika Bhakti Praja,” dalam *Suara Merdeka*, 28 November 1992.
- “Wayang, Antara Tontonan dan Tuntunan,” dalam *Suara Merdeka*, 10 Februari 1996.
- “Wali Kota Programkan Pentas Wayang Kulit di 9 Kecamatan,” *Suara Merdeka*, 10 Oktober 1992.
- Wawancara dengan Mas Ton, 6 Maret 2014.
- Wawancara dengan Ki Djoko Hadiwidjojo, 18 April 2014.
- Wawancara dengan Ki Manteb Soedharsono, 13 Maret 2014.